

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Dasar Teori**

##### **2.1.1. Teori Legitimasi**

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepannya. Hal itu, dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2011).

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitar baik fisik maupun nonfisik (Hadi, 2011). O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Deegan dan Tobin (2002) menyatakan legitimasi dapat diperoleh jika keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan akan terancam, sehingga dapat dinyatakan bahwa legitimasi perusahaan dimata

*stakeholder* merupakan faktor signifikan untuk mendukung citra dan reputasi perusahaan (Hadi, 2011).

### 2.1.2. Teori Stakeholder

Konsep pertanggung jawaban sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970-an, yang secara umum di kenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*. Nilai-nilai yang memenuhi ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai (*Value*) secara eksplisit dan tak bisa dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. (Freeman et al., 2004).

Dalam kesehariannya perusahaan cenderung aktif untuk mengutamakan kepentingan dari sebagian kecil *stakeholder* sehingga kepentingan dari *stakeholder* lainnya terabaikan. Friedman 1970 dalam (Ghozali dan Chairiri, 2007) menulis artikel di New York Times Magazine yang mengklaim tentang perusahaan-perusahaan itu hanya berpikir bagaimana memperoleh keuntungan sedangkan masalah lainya seperti halnya peningkatan kemakmuran masyarakat itu lebih baik diserahkan kepada pemerintah saja. Hal ini memunculkan gagasan yang dinamakan *stakeholder theory*.

*Stakeholder theory* adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders*-nya.

*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang di gunakan perusahaan. Oleh karena itu kekuatan *stakeholder* di tentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut (Ghozali dan Chairiri, 2007).

Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Maka, ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2007).

### **2.1.3. Corporate Sustainability**

Menurut *Bruntland Report* (1987) *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga yang terpenting adalah memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada secara bijaksana agar tidak menghabiskan sumber daya lingkungan untuk generasi masa depan. Salah satu kunci utama dalam memahami *sustainability* adalah memahami keterkaitan antar berbagai aspek lingkungan. *Corporate sustainability* dianggap sebagai strategi bisnis dalam

memenuhi dan menyeimbangkan kebutuhan *stakeholder* saat ini dengan masa depan (*Report of the United Nations World Commission on Environment and Development*, 1987).

Strategi bisnis yang disusun oleh perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan transparansi, pengembangan karyawan secara tepat dan penggunaan sumber daya secara efisien. Transparansi yang dimaksud perusahaan disini adalah *sustainability report*. *Sustainability report* sering disebut juga *Triple Bottom Line Reporting*. Istilah itu dipopulerkan pertama kali oleh John Elkington (1997) di dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks. The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* yang dikutip dalam Wibisono (2007) memberi pandangan perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

## **2.3. Environmental, Social, dan Governance (ESG)**

### **2.3.1. Pengertian ESG**

Saat ini belum ada definisi standar mengenai ESG. ESG memiliki 3 faktor yang bisa di deskripsikan secara luas yaitu lingkungan, sosial dan tata kelola. Faktor lingkungan mencakup hubungan perusahaan dengan lingkungan secara fisik, faktor sosial mencakup dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat, dan faktor tata kelola berhubungan dengan bagaimana perusahaan dikelola (FSCO, 2016).

Pengukuran ESG mencakup seluruh dimensi tambahan kinerja perusahaan, yang tidak terlihat di dalam laporan keuangan karena dalam laporan keuangan, perusahaan tidak memiliki kapasitas untuk menginformasikan pihak manajemen dan investor terkait reputasi, kualitas, *brand capital*, keselamatan, budaya perusahaan, strategi dan cara untuk mengetahui aset lainnya yang lebih signifikan dalam perekonomian global berbasis pengetahuan (Bassen & Kovacs, 2008). Sehingga indikator ESG akan menangkap lebih banyak pengungkapan data non keuangan dalam lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dan bisa digunakan untuk evaluasi kapabilitas pengelolaan perusahaan sambil meminimalkan risiko (Galbreath, 2013).

### **2.3.3. Pengungkapan ESG**

ESG saat ini telah menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau keberlangsungan perusahaan yang penting. Permintaan terhadap ESG yang lebih sistematis telah meningkat dan memunculkan sejumlah organisasi dunia yaitu *Global Reporting Initiative* dan *United Nations Global Compact* (Lydenberg, 2013). Kedua organisasi ini kemudian membuat suatu inisiatif yang diberi nama *Principle of Responsible Investing (PRI)* di tahun 2006. Pedoman ini memberikan respon jelas kepada investor, dimana isu ESG bisa diintegrasikan ke dalam analisis investasi dan dapat memberikan panduan seperangkat praktek standar.

Pengungkapan ESG di setiap negara berbeda-beda. Banyak perusahaan mengadopsi *Global Reporting Initiative (GRI)* sebagai pedoman dalam melaporkan kinerja ESG mereka. Ada metode konvensional untuk melakukan pengungkapan, namun seiring berkembangnya teknologi banyak orang menggunakan metode modern yang menggunakan situs tertentu dan media sosial (Fatemi, 2017). Penelitian mengenai tingkat dan kualitas laporan ESG sebagian besar didasarkan pada pemberian peringkat dan *checklist* yang dikembangkan oleh para peneliti yang secara manual mengumpulkan data dari laporan tahunan dan situs perusahaan. Sekarang, pengungkapan ESG juga datang dari perusahaan khusus penyedia informasi, contohnya adalah data skor ESG yang dikumpulkan oleh bloomberg dan digunakan untuk penelitian masa kini.

#### **2.3.4. Peraturan Terkait Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia**

Peraturan terkait pengungkapan laporan keberlanjutan dimulai dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di dalam undang-undang pada pasal 66 ayat 2 butir c telah disebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam PSAK 1 disebutkan bahwa entitas dapat menyajikan secara terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah. Laporan disajikan khususnya bagi entitas yang

berada pada industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Pada Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor KEP-431/BL/2012 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik dapat mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan atau laporan tanggung jawab sosial.

Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela, namun seiring dengan bertambahnya tuntutan pemangku kepentingan maka pada tahun 2017, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan dan disampaikan kepada OJK setiap tahun paling lambat tanggal 30 april tahun berikutnya. Dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 disebutkan jika LJK, emiten dan juga perusahaan publik tidak menyusun dan tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan, maka akan mendapat sanksi administrasi berupa teguran atau peringatan tertulis. Adanya peraturan terbaru ini tidak serta merta membuat seluruh perusahaan langsung mengungkapkan laporan keberlanjutannya

karena adanya kompleksitas dan keragaman setiap usaha, maka OJK juga menerapkan peraturan ini secara bertahap.

## **2.4. Kinerja Keuangan**

### **2.4.1. Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan bisnisnya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *General Accepted Accounting Principle* (GAAP), dan lainnya (Fahmi, 2013).

Kinerja keuangan merupakan aktivitas untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain (Sawir 2005)

### **2.4.2. Pengukuran Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo (IAI, 2002).



Metode yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah metode rasio keuangan. Menurut Sundjaja dan Barlian (2003) analisis rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima macam kategori yaitu (Hery, 2016):

a. Rasio Likuiditas

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo.

b. Rasio Solvabilitas

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

c. Rasio Aktivitas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

d. Rasio Profitabilitas

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

e. Rasio Ukuran Pasar

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan.

#### **2.4.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah (Munawir, 2011):

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, apabila perusahaan tersebut di likuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

#### **2.5. Kerangka Konseptual, Penelitian terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

##### **Pengaruh Pengungkapan *Environmental, Social, dan Governance* terhadap Kinerja keuangan**

Porter (1990) mengasumsikan ada dua manfaat yang diperoleh perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pertama, perusahaan yang

berkelanjutan diharapkan akan mempunyai biaya yang kecil terhadap regulasi di masa depan. Contohnya, dalam stabilitas arus kas, mereka membayar biaya yang lebih sedikit untuk beradaptasi dengan regulasi baru di masa kini. Kedua, perusahaan yang mengeluarkan regulasi sebelum pesaingnya akan memimpin industrinya karena mereka memiliki praktek usaha terbaik yang ditunjukkan dari kesejahteraan *stakeholder*. Pengungkapan ESG akan mencerminkan seberapa transparan informasi yang diberikan oleh perusahaan, sehingga jika perusahaan beroperasi baik maka akan meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik dengan *stakeholder* yang akan meningkatkan pendapatan laba perusahaan di masa depan.

Masih terdapat hasil yang berbeda-beda terkait hubungan pembangunan berkelanjutan perusahaan dengan kinerja keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan Barnett (2007), saat perusahaan melakukan tanggung jawab sosial maka perusahaan akan mendapatkan kepercayaan *stakeholder*. Teori yang dikatakan oleh Freeman (1984) adalah bahwa dalam pandangan pemangku kepentingan hubungan antara praktek pembangunan berkelanjutan perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Barnett dan Salomon (2012) menemukan bahwa ada hubungan berbentuk U dimana jika perusahaan melakukan kegiatan berkelanjutan maka akan berpengaruh negatif dengan kinerja keuangan. Pada suatu titik, akan ada *reversal* dimana jika perusahaan terus menerus melakukan kegiatan keberlanjutan maka akan berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Atan, Mahmudul dan Mohamed (2017) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor ESG dengan profitabilitas perusahaan. Tetapi untuk sebagian besar penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Ameer dan Othman (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara praktek *sustainability* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Bodhanwala dan Ruzbeh (2017) menemukan bahwa ada hubungan positif antara *sustainability* dengan profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Velte (2017) juga menemukan bahwa pengungkapan ESG mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Dengan demikian hipotesis yang dibangun adalah:

Ha : Pengungkapan *Environmental, Social, dan Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.